

PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA DI KOTA PEKANBARU

MUHAMMAD IKHSAN
NPP. 29.0279

*Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0279@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Participation or political participation is the most important part in the life of the state and the manifestation of democracy. However, the participation of the younger generation is still lacking, especially in Pekanbaru City where 20% of the voters are the younger generation. Through Mayor Regulation No. 85 of 2013 concerning the main tasks and functions of the Pekanbaru City Political and National Unity Agency, it regulates the provision of political education that is useful for providing political understanding so that there is an active and massive participation of the younger generation in Pekanbaru City. **Objectives:** This study was to determine the role of Bakesbangpol Pekanbaru in increasing youth participation in politics and to find out what factors hindered Bakesbangpol Pekanbaru in increasing youth participation. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions from what is obtained in the field. Researchers found the fact that there are several obstacles in efforts to increase the participation of the younger generation, namely changes in organizational structure, lack of clarity in the form of institutions, limited funds and the mindset of the younger generation. **Results/Findings:** The researcher found that there were efforts made to overcome obstacles, namely the implementation of tasks according to the rules and corridors, applying a priority scale in the implementation of activities and conducting massive political education for young people. **Conclusion:** The results of the study show that the role of Bakesbangpol Pekanbaru City in increasing youth political participation as a whole has been going well
Keywords: Political Participation, Young Generation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keikutsertaan atau partisipasi politik merupakan bagian terpenting dalam hidup bernegara dan wujud dari demokrasi. Akan tetapi partisipasi dari generasi muda masih kurang terutama di Kota Pekanbaru dengan 20% pemilih merupakan generasi muda. Melalui Peraturan Walikota No.85 Tahun 2013 tentang tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pekanbaru mengatur tentang pemberian pendidikan politik yang berguna untuk memberi pemahaman politik agar terjadi partisipasi yang aktif dan masif dari generasi muda di Kota Pekanbaru. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui peranan Bakesbangpol Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam hal politik serta mengetahui faktor apa saja yang menghambat Bakesbangpol Pekanbaru dalam melakukan peningkatan partisipasi pemuda. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari apa yang diperoleh di lapangan. Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat beberapa hambatan dalam upaya peningkatan partisipasi generasi muda yakni adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan bahwa terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan peran Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Generasi Muda

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (Kusmanto, 2013) keikutsertaan didalam politik merupakan bentuk dari bagian terpenting didalam aspek kehidupan dalam bernegara secara demokratis. Hal tersebut dilakukan atas asas pemerintahan yang memiliki kekuasaan memberikan yang luas dan bebas kesempatan terhadap setiap warganegaranya untuk ikut serta didalam setiap adanya aktivitas politik. Namun hal yang sebaliknya warganegara tersebut juga wajib untuk memperhatikan tingkatan dalam partisipasi atau keikutsertaan dalam politik yang tinggi. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dari itu kadar demokratisasi negara tersebut dipertanyakan atau tidak bisa dikatakan sebagai layak.

(Abdullah 2011 : 53) menyatakan bahwasanya masyarakat memiliki hak politik yang satu satunya dimiliki adalah dengan memberikan suaranya disaat berlangsungnya serangkaian proses pemilihan umum, setelah itu hak yang dimiliki oleh masyarakat mengalami perpindahan tangan

kepada partai politik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi ketidak puasan dan ketidak pahaman masyarakat yang suaranya tidak tersampaikan ketika hak mereka telah diberikan kepada partai politik. Maka dalam permasalahan ini menimbulkan tingginya angka golput yang melambangkan ketidak puasan terhadap penyajian penampilan kepribadian yang disajikan, didalam pelaksanaa penerapa keikutsertaan politik masih sering diperdebatkan atau dipermasalahkan tentang cara pemakaian politik yang melibatkan uang untuk memberi pengaruh terhadap cara – cara penentuan tentang calon dari partai politik yang dianggap sesuai, memenuhi syarat dan ketentuan.

Permasalahan tentang keikutsertaan dalam politik tidaklah hanya bersangkutan dengan karakter, sifat, dan watak dari suatu pemerintahan yang dimiliki oleh negara, akan tetapi lebih berketerkaitan terhadap karakter dari masyarakat yang ada didalam negara tersebut dan efek yang diberikan. Generasi muda sebagai *agent of change* merupakan generasi perubahan bangsa yang akan mengisi pembangunan di Indonesia. Namun kenyataannya, generasi muda saat ini memang sangat kurang dalam berpartisipasi politik, mereka cenderung mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan politik di Indonesia, saat ini generasi muda cuma peduli dengan isu-isu politik yang sedang memanas saja namun keikutsertaan para generasi muda ini cuma terjalin di permukaan.

Tetapi apabila tidak diajari dengan pembelajaran, perihal ini pastinya hendak memunculkan partisipasi pasif dari generasi muda dikala ini. Oleh sebab itu, diharapkan kesertaan generasi muda tidak cuma pada isu-isu politik yang berlangsung, namun pula bisa diaplikasikan pada proses politik, ialah lewat kesertaan aktif dalam pemilihan umum atau Pilkada.

Di kota Pekanbaru generasi muda berjumlah 20% dari keseluruhan jumlah yang berhak menyuarakan suaranya, maka dari itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penentuan hasil akhir dari bentuk kebijakan – kebijakan politik serta sejenisnya. Hal itu sangatlah berpotensi padaperolehan suara di pemilu, sikap pemilih pemula banyak mempunyai bentuk karakteristik, pada umumnya masih bersifat labil dan tidak peduli atau apatis, kurangnya ilmu pengetahuan politik yang diperoleh dan lebih lebih condong kepada mengikuti trend atau teman sepergaulan yang tidak didasari dengan pilihan, juga baru belajar terhadap rangsangan politik khususnya dalam pesta demokrasi. Minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya arti dari demokrasi yang sedang dirayakan ataupun juga di jalankan pada saat itu.

Rendah dan minimnya tentang pengetahuan ilmu politik diperoleh oleh kalangan muda yang notabene merupakan pemilih dikategorikan pemula menyebabkan berkurangnya gairah dan antusias terhadap politik yang ada dikota Pekanbaru ini, ditandai dengan rendahnya pemahaman, tidak mengetahui cara memilih, partisipasi yang rendah

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat partisipasi generasi muda yang pasif dan kurang di Kota Pekanbaru, pemerintah memilik peran dan andil dalam mengatasinya, dikarenakan masyarakat tentu saja membutuhkan

faktor yang mendasari pemahaman tentang politik dan sosial itu sendiri, Peruntukan pembelajaran selaku bagian berguna dari kehidupan sosial dikala ini. Pembelajaran politik wajib dilakukan dengan cara menyeluruh untuk semua warga, serta dengan cara menyeluruh untuk generasi muda, khususnya para pemilih primer. Tetapi dalam metode implementasinya sendiri masih ada kasus yang belum teratasi dengan baik serta betul.

Permasalahan-permasalahan yang ada itu pastinya membatasi penerapan pembelajaran politik, serta ingin tidak ingin hendak pengaruhi kesertaan generasi muda serta warga, alhasil mereka bukan lagi subjek politik, melainkan poin politik. Dengan adanya pendidikan politik yang dilaksanakan diharapkan generasi muda dapat sadar terhadap politik, agar bisa bersinergi kepada pemerintah dalam membangun partisipatif, yang mana masyarakat akan ingat terhadap hak dan kewajibannya, sadar hukum, kritis, aktif, dan kreatif serta konstruktif.

Adapun hal yang berkaitan dengan pemberian pendidikan atau pengetahuan tentang politik yang dilakukan oleh pemerintah hal itu telah diatur didalam peraturan walikota No. 85 tahun 2013 mengenai tugas pokok serta fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaannya akan dianalisis mengenai peran Bakesbangpol Pekanbaru secara lebih dalam, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu dari pelaksanaan peningkatan partisipasi politik bagi pemilih muda maupun dalam hal peranan Bakesbangpol. Penelitian Aulia Rahmawati tahun 2017 yang berjudul Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Menambahkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 menemukan bahwa bahwasanya rendahnya pemilu walikota dan wakil walikota Pekanbaru 2017 disebabkan karena tidak berjalannya fungsi komisi pemilihan umum (KPU) dan juga sosialisasi hanya dilakukan ke beberapa sekolah dan universitas. Usaha sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU di tempat umum misalnya saat *car free day* (CFD) yang di laksanakan setiap *weekend*. Penelitian oleh Yasni Efyanti tahun 2018 yang berjudul Peran Kesatuan Bangsa dan Politik LINMAS Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan menemukan KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh telah melakukan usaha guna menjaga kestabilan politik dibidang *social* politik dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada, pembinaan tersebut dilakukan lewat pelatihan-pelatihan dibidang *social* politik”. Tentu saja dalam hal ini masih banyak LSM yang tidak mengadakan konsolidasi kepengurusan dengan baik, banyaknya LSM yang tidak melaporkan kegiatan berkala, dan konsolidasi organisasi dengan baik. Adapun tindakan kesbangpol linmas Kota Sungai Penuh menghimbau dan menyurati secara resmi organisasi tersebut agar menaati peraturan yang ada. Penelitian oleh Iko Deswanda Tahun 2018 yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan

Berintegrasi Tahun 2018 menemukan bahwa Dalam menambahkan partisipasi pemilu di kabupaten Bengkalis pemerintah dan Kesbangpol, kabupaten Bengkalis mengadakan usaha untuk menarik masyarakat agar tidak melukan golput, usaha pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di kesbangpol dengan menambahkan sumber daya manusia, *financial*, dan sarana prasarana. faktor jadi penghambat sangat banyak antara lain: terbatasnya SDM dalambidang tertentu, minimnya sarana dan prasarana, belum optimaldalam penyerapan anggaran

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini untuk memperoleh pengetahuan tentang peranan Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam upaya peningkatan partisipasi politik generasi muda. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang berdasarkan fakta diukur secara kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan dijelaskan secara deskriptif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian dalam mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara keseluruhan, luas dan mendalam (Moleong, 2017). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan pada 10 orang informan dengan penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Kabag Program dan Perencanaan Kesbangpol (1 orang), Kabid Politik dan Hubungan Antarlembaga (1 orang), Kasubid Politik (1 orang), Kasubid Hubungan Antarlembaga (1 orang) dan Masyarakat pemilih pemula (3 Orang). Analisis data menggunakan teori Sugiyono (2018:247) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

Peneliti menganalisis peran Bakesbangpol Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori peran menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213). Dengan dimensi antara lain Norma dan aturan, Perbuatan atau tindakan organisasi dan perilaku individu/masyarakat.

A. Peraturan

Pada teori Levinson dalam Soekanto yang pertama yaitu Peranan mencakup norma dan aturan yang dikaitkan dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat, dalam hal ini penulis menggunakan teori tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna memperoleh informasi mengenai norma dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan peranannya pada penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda.

Peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan politik termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Dimana yang menjadi sasaran pendidikan politik tersebut ialah partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat hingga generasi muda. Perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Walikota tersebut menjelaskan dan memaparkan berbagai tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis dilapangan, penulis melihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan politik bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat, dimana para pegawai melakukan pelayanan administrasi dengan baik dan sesuai SOP, kemudian setiap pemegang jabatan paham betul akan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi melalui wawancara dengan Kasubid Politik Ibu Martini, S.Sos, M.Si ditemukan fakta bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebenarnya sudah melaksanakan peranannya dengan benar dan sesuai dengan landasan hukum yang mengikat, artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan hak dan kewajibannya bagi generasi muda. Namun, karena anggaran yang kecil mengakibatkan terjadinya suatu kendala, menyebabkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda masih belum begitu optimal, akhirnya program tersebut masih belum memenuhi harapan yang seharusnya bisa memberikan pendidikan politik kepada seluruh pemilih pemula Kota Pekanbaru hingga wilayah terpencil dan mampu mendorong partisipasi generasi muda, namun belum dapat tercapai disebabkan banyaknya program yang dipotong akibat anggaran yang sangat minim.

B. Organisasi

Berdasarkan teori Levinson dalam Soekanto yang kedua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai suatu organisasi dalam melakukan tindakan bagi masyarakat dalam hal ini mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, membuat beberapa program pendidikan politik tersebut dengan tujuan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban kepada generasi muda, beberapa program pendidikan politik tersebut diantaranya adalah:

- Giat Penyuluhan Politik kepada Generasi muda melalui sosialisasi bagi sekolah di dalam Kota Pekanbaru peserta terdiri dari Pemilih Pemula, Narasumber terdiri dari Kesbangpol, KPU, Bawaslu, Polres Sukajadi, dan Dandim.
- Giat Forum Diskusi Politik dilaksanakan Melalui Sosialisasi di forum remaja dalam Kota pesertanya terdiri dari generasi muda, anak yang berusia 17-21 tahun.
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula di Sekolah dalam Kota Pekanbaru Peserta terdiri Dari Siswa siswi SD, SMP, SMA. Narasumber dari Kesbangpol, KPU, Bawaslu, Polres, Dandim.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bakesbangpol Bapak Zulfahmi Adrian, AP, M.Si diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab terhadap faslitasi dan pendanaan pada kegiatan, sementara salah satu kendala yang menyebabkan kurang efektifnya program yang berjalan adalah anggaran yang begitu kecil. Hal ini tentu perlu untuk menjadi perhatian semua pihak, karena pendidikan politik telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010. Meskipun begitu pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai suatu organisasi telah melakukan suatu tindakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan tetap mengoptimalkan proses berjalannya program dengan segala anggaran yang ada. Pendidikan politik yang hanya dilakukan dalam setahun sekali itu masih belum mencapai tahap terampil dalam bertindak dan terampil dalam berkomunikasi.

C. Struktur Masyarakat

Teori Levinson dalam Soekanto juga mengatakan bahwa peran juga dapat digambarkan sebagai suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Maksudnya adalah peran suatu organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu tindakan yang penting dan mampu mengubah pola pikir dan tindakan yang ada dalam struktur sosial masyarakat. Tatanan kehidupan di masyarakat memiliki struktur sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pendidikan, faktor pendidikan ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran politik dalam suatu masyarakat. Tingkat pendidikan memiliki peran dalam proses penanaman nilai-nilai politik kepada pemilih pemula, karena seberapa mengerti seseorang terhadap

politik juga bergantung pada level pendidikan terakhir mana yang ditempuh.

Dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman generasi muda tentang politik di Kota Pekanbaru masih tergolong kurang karena belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik dan dinamika politik yang baik. Para generasi muda dengan pendidikan yang tinggi saja, belum tentu memiliki pemahaman yang baik tentang politik yang berdasarkan akuntabilitas dan transparansi. Begitu juga dengan generasi muda yang memiliki pendidikan yang rendah, generasi muda hanya berpikir untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan. Tentunya fenomena ini sangat disayangkan apabila terus terjadi, akibatnya bisa melahirkan sikap apatis yang turun temurun terhadap politik, alhasil masyarakat hanya akan menerima sepenuhnya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa berani mengkritik sedikitpun.

Dapat disimpulkan bahwa masih ada saja pemilih pemula dan masyarakat sangat acuh tak acuh tentang politik, dan sikap ini juga bisa muncul akibat ketakutan masyarakat tentang paradigma mengenai politik terdahulu. Bentuk perilaku masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melaksanakan program pendidikan politik.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyelesaikan Hambatan-Hambatan Yang Ada

Guna menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kota Pekanbaru, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memiliki langkah-langkah tersendiri untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah-langkah tersebut ialah:

- Menjalankan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan koridor yang berlaku. Walaupun memiliki keterbatasan terhadap peraturan yang ada, namun tetap bisa melaksanakan berbagai program yang ada.
- Melakukan improvisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan politik. Cara yang dilakukan adalah dengan memahami prosedur diperaturan yang sudah ada, dengan begitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tetap melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tupoksinya dantampa melanggar aturan yang ada.
- Mengatasi keterbatasan dana, yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan skala prioritas, dimana dengan keterbatasan dana kegiatan haruslah tetap berjalan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfokuskan pada beberapa kegiatan saja dengan semaksimal mungkin, dalam pelaksanaannya badan Kesbangpol melakukan sosialisasi pendidikan politik setahun sekali di satu forum remaja dengan optimal, serta sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di dua sekolah dengan harapannya kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan bermanfaat bagi penerima sosialisasi.
- Mengubah pola pikir generasi muda, melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya sekeras mungkin untuk mengubah padangan buruk generasi muda terhadap politik, dan terus mengajak generasi muda berpartisipasi dalam politik, dengan harapan mampu mengubah pola pikir generasi muda dan meningkatkan partisipasi politik generasi muda kedepannya.

3.3. Faktor Penghambat Badan Kesbangpol dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Kota Pekanbaru

A. Hambatan Teknis

- **Perubahan Struktur Organisasi**

Dalam dua tahun terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah Mengalami dua kali pergantian Kepala Badan, sehingga pada dalam pembentukan rencana kerja atau susunan kerja yang sudah masuk dalam renstra (rencana strategi kerja) mengalami perlambatan dalam mencapai targetnya di karenakan pergantian dari struktur organisasi Kesbangpol.

- **Kepastian Status Lembaga**

Kesatuan Bangsa dan Politik masih sering menjadi pertanyaan, dikarenakan perbedaan sikap antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota peraturan yang tersampaikan sampai saat ini hanya sebatas setiap Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik lembaga yang dimaksud dapat berbentuk Kantor maupun berbentuk Badan, jadi masih belum jelas bentuk dari lembaga tersebut

B. Hambatan Non Teknis

- **Keterbatasan Dana**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan program pendidikan politik bagi generasi muda berperan sebagai fasilitator, ini mengartikan bahwa pihak Kesbangpol yang mendanai jalannya program, sehingga berjalannya program sangat bergantung pada sumber daya yang ada. Sementara itu anggaran yang diserap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam program pendidikan politik generasi muda sangatlah terbatas.

Anggaran yang ada dimanfaatkan untuk pelaksanaan berbagai program, diantaranya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan satu kali setahun bagi generasi muda, kemudian pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula yang seharusnya dilaksanakan untuk empat sekolah dipotong menjadi dua sekolah saja. Hal ini membuat proses pembinaan pendidikan politik bagi generasi muda masih belum efektif.

- **Pola Pikir Generasi Muda**

Masih banyak ditemukan generasi muda yang beranggapan bahwa politik hanya untuk orang tua saja, sehingga generasi muda tidak memiliki ketertarikan untuk ikut dalam berpartisipasi politik, banyak dari generasi mudahnya menerima saja siapa pun yang akan terpilih menjadi kepala

daerahnya tanpa ingin mengetahui mengenai profil dari pasangan calon.

Hal ini tentunya muncul dari ketakutan generasi muda terhadap paradigma mengenai politik terdahulu sehingga membentuk pola pikir bahwa politik merupakan sesuatu yang buruk. Akan sangat disayangkan apabila pola pikir seperti ini dipertahankan dan menjadi turun temurun yang tentunya akan mempengaruhi partisipasi generasi muda terhadap kehidupan berpolitik.

Diperlukan adanya kesadaran dari masing-masing individu generasi muda serta masyarakat dalam menyelesaikan pemilihan umum tersebut, sehingga pada saat berlangsungnya proses pemilihan yang minim partisipasi selalu menyalahkan panitia penyelenggara. Pemerintah dan institusi lain yang terlibat telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam rangka menyelesaikan pemilihan umum. Sangat disayangkan jika dana besar yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden minim partisipasi politik generasi muda.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi Politik pada generasi muda merupakan hal yang vital karena terkait dengan keberlangsungan proses demokrasi bangsa pada masa mendatang. Bakesbangpol yang memiliki tugas pokok dan fungsi guna menangani hal tersebut menggunakan hak dan kewajibannya sebagai fasilitator penyelenggaraan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik bagi generasi muda terutama di Kota Pekanbaru. Hal tersebut sama dengan penelitian Yasni Efyanti (2018) yang menjelaskan bahwa bidang pendidikan sosial politik masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab kesbangpol melalui pelatihan dan sosialisasi (Efyanti, 2018).

Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala baik yang bersifat teknis dari dalam Bakesbangpol sendiri maupun non teknis yang berasal dari eksternal lembaga. Hambatan tersebut diantaranya adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda. Menanggapi hal tersebut muncul upaya berupa pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif. Sesuai dengan penelitian Iko Deswanda (2018) yang menemukan berbagai upaya kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi dan mengurangi golput dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada di kesbangpol dengan menambahkan sumber daya manusia, *financial*, dan sarana prasarana (Deswanda, 2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif. Meskipun juga terdapat beberapa hambatan seperti adanya

perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda. Tetapi hal tersebut dapat diatasi melalui peranan Bakesbangpol Kota Pekanbaru sebagai fasilitator pendidikan politik yang dapat terlaksana dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi politik generasi muda di Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2011). Kesadaran dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 14(2).
- Alfiyah, N. I., & Tini, D. L. R. (2021). EDUKASI POLITIK PEMUDA KARANG TARUNA DESA LENTENG TIMUR DALAM MENGHADAPI PILKADA DI KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 2(1), 13-19.
- Efyanti, Y. (2018). Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(02), 65-79.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 28-36.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT remaja rosdakarya*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- RAHMAWATI, A. (2018). *FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Soekanto, S. (2009). Peranan sosiologi suatu pengantar. *Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta*

Sugiono. (2018). *metode pene;otoan Manajemen*. bandung: alfabeta swanda.

